

**KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA BANGUN REJO  
KECAMATAN Na IX-X KABUPATEN  
LABUHAN BATU UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
INTAN PURNAMA SARI SIPAHUTAR  
198520013**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

**KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA BANGUN REJO  
KECAMATAN Na IX-X KABUPATEN  
LABUHAN BATU UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unversitas Medan Area



**OLEH :**  
**INTAN PURNAMA SARI SIPAHUTAR**  
**198520013**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

### LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur  
Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten  
Labuhan Batu Utara  
Nama : Intan Purnama Sari Sipahutar  
NMP : 198520013  
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.Si



Beltahmamero Simamora, S.IP., MPA

Mengetahui:



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si



Khairunnisah Lubis, S.Sos., M.I.Pol

Tanggal Lulus : 06 September 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa, skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya dengan jelas, sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar sarjana yang saya peroleh ataupun sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 05 Oktober 2023



Intan Purnama Sari Sipahutar  
198520031

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Purnama Sari Sipahutar  
NPM : 198520013  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul : Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara, beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 03 Oktober

2023 Yang menyatakan,

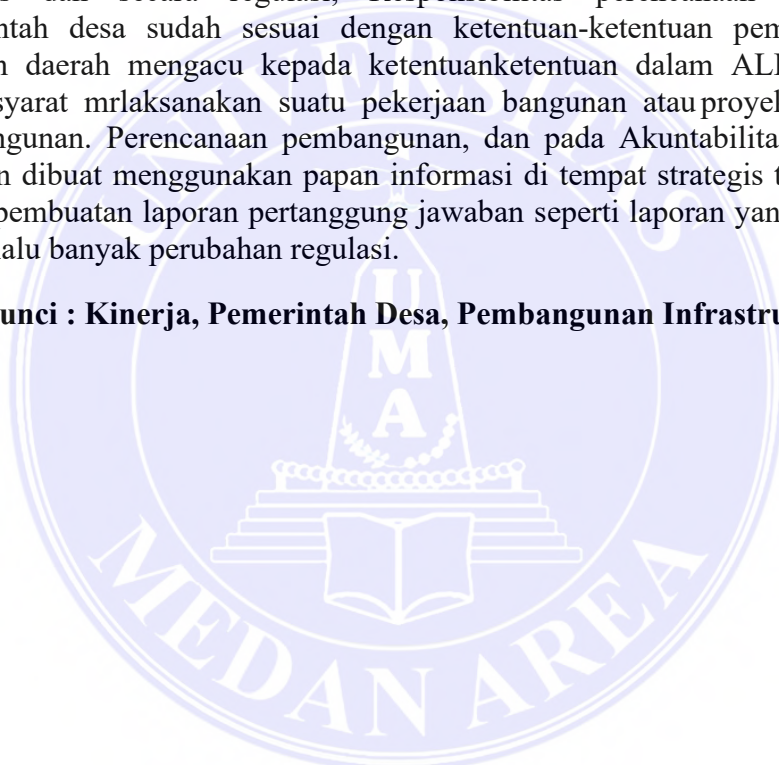


Intan Purnama Sari Sipahutar

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator menurut teori Agus Dwiyanto (2006) Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan di desa Bangun Rejo berjalan sudah cukup baik karena telah di buktikan dari produktivitas dari segi penggunaan hemat tenaga, segi hemat waktu, serta segi hemat penggunaan biaya. Kualitas layanan cukup baik sehingga membuat kinerja pemerintah desa berjalan dengan maksimal, Responsivitas berdasarkan skala prioritas dan secara regulasi, Responsibilitas perencanaan pembangunan pemerintah desa sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah pusat maupun daerah mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam ALBESTEK atau syarat-syarat mrlaksanakan suatu pekerjaan bangunan atau proyek perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan, dan pada Akuntabilitas pertanggung jawaban dibuat menggunakan papan informasi di tempat strategis terkait kendala dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban seperti laporan yang terlalu rumit dan terlalu banyak perubahan regulasi.

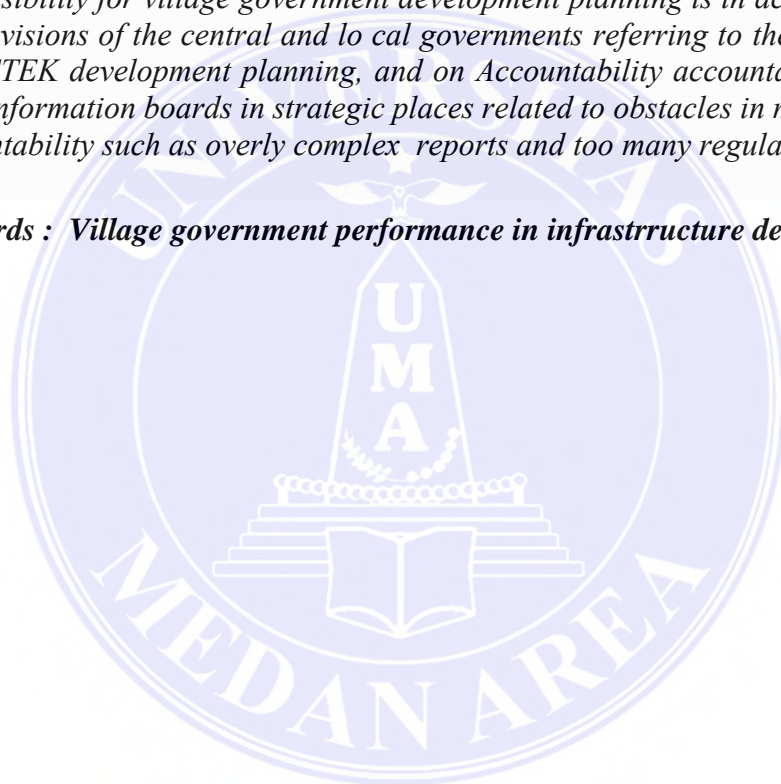
**Kata kunci : Kinerja, Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur**



## ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out and analyse how the Village Government Performance in Village Road Infrastructure Development in Bangun Rejo, Na IX-X District, North Labuhan batu Regency. This study uses a qualitative descriptive research approach. Data collection techniques were carried out through observation, interview and documentation. The results of this study show that by using indicator according to the theory of Agus Dwiyanto (2006) the performance of the Village Government in Infrastructure Development carried out in Bangun Rejo village is running quite well because it has been proven in terms of productivity in terms of energy-saving use, time-saving, and cost-effective use. The quality of service is good enough to make the performance of the village government run optimally, Responsiveness based on the priority scale and in regulation, Responsibility for village government development planning is in accordance with the provisions of the central and local governments referring to the provisions in ALBESTEK development planning, and on Accountability accountability is made using information boards in strategic places related to obstacles in making reports Accountability such as overly complex reports and too many regulatory changes.*

**Keywords :** *Village government performance in infrastructure development*



## RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Intan Purnama Sari Sipahutar lahir di pulo godang, pada tanggal 23 juni 2001. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara yang merupakan putri dari Ayahanda Ali Borkat Sipahutar dan Ibunda Rosnila Sari Rambe. Penulis memiliki kakak laki laki yang bernama Amirullah Sipahutar dan memiliki dua adik perempuan yang bernama Mawar Jelita Sari Sipahutar dan Fatma Azzahra Sipahutar.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis mulai dari Sekolah Dasar (SD) di Negeri 112323 Silumajang selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Mts Swasta AL-Wahliyah Simpang Marbau pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Swasta AL-Washliyah 2 Merbau dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yaitu di Universitas Medan Area (UMA) dan mengambil program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara”**. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Medan Area. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Ali Borkat Sipahutar dan ibunda Rosnila Sari Rambe yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan juga teman saya yang sudah saya anggap seperti saudara saya Widya Putri Maharni tercinta yang senantiasa selalu menemani saya bimbingan, mendukung dan memberikan semangat sehingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah kamu berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu

dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritikan dan bimbingan penulis harapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan terutama kepada:

1. Motivasi, Arahan, Nasihat serta meluangkan waktu, tenaga dan saran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
2. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, MAP selaku ketua jurusan Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono M.Si Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, skripsi dengan sangat baik.
4. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA selaku Dosen Pembimbing II atas segala kritik dan saran serta arahan mengenai penulisan skripsi yang selalu bersifat membangun dan memberikan dorongan semangat terhadap penulis.
5. Ibu Hadiyanti Arini, S.Sos, M.AP, Selaku sekretaris yang telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
7. Bapak Kepala Desa Bangun Rejo, dan seluruh anggota yang ada di kantor Kepala Desa Bangun Rejo dan kepada masyarakat Desa Bangun Rejo yang

telah memberikan izin riset kepada saya dan membantu saya untuk memperoleh data-data yang ada di Kantor Kepala Desa.

8. Khususnya kepada kedua orang tua saya tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang hingga saat ini, serta dukungan doa yang tiada henti-henti yang diberikan oleh kedua orang tua penulis beserta materi yang selalu diusahakan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada kakak saya Amirullah Sipahutar dan Adik saya Mawar Jelita Sari Sipahutar, Fatma Azzahra Sipahutar yang selalu memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis.
10. Untuk sahabat seperjuangan saya, Widya Putri Maharni, Ananda Salsabi, Bina Lorensia, Anjelina Hutauruk, Sri Indah Pratiwi dan Nengsrih yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Proposal ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan proposal ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 03 Agustus 2023

  
Intan Purnama Sari Sipahutar

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Pengertian Kinerja.....	9
2.1.1 Tujuan Kinerja .....	10
2.1.2 Indikator Kinerja .....	12
2.1.3. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja .....	15
2.2. Pengertian Kinerja Organisasi.....	17
2.2.1. Tujuan Kinerja Organisasi .....	19
2.2.2. Manfaat Penelitian .....	20
2.3. Pemerintah Desa.....	21
2.4. Pembangunan Infrastruktur .....	25
2.5 Desa.....	26
2.6 Penelitian Terdahulu .....	29
2.7. Kerangka Berpikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	32

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	32
3.3. Informan Penelitian .....	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5. Teknik Analisis Data .....	37
3.6. Definisi Konsep dan Operasional.....	41
3.6.1 Definisi Konsep .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	44
4.1.1 Profil Desa Bangun Rejo .....	44
4.1.2. Struktur Organisasi Desa Bangun Rejo .....	45
4.1.3 Tugas dan Fungsi Desa .....	46
4.1.4. Visi dan Misi Desa.....	51
4.2. Pembahasan Penelitian.....	52
4.2.1. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan batu Utara .....	52
4.2.2. Pembahasan Hasil Penelitian .....	61
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	33
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Bangun Rejo Tahun 2023 .....	45
Tabel 4.2 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangun Rejo Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jalan Desa Bangun Rejo.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	31
Gambar 3.1 Model Analisis Data Penelitian Kualitatif .....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Bangun Rejo.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Surat Menyurat .....	73
Lampiran Bersama Informan .....	75
Lampiran Infrastruktur... ..	76





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Undang-undang bahwa dalam sebuah pemerintah.Kabupaten/kota dibentuk pemerintahan Desa dan Badan PermusyawaratanDesa(BPD).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasal 26 dikatakan bahwa kepala Desa mempunyai tugas penyelenggara urusan pemerintah,pemangunan, dan kemasyarakatan. Jelas dikatakan dalam hal ini yaitu kepala desa memiliki tugas dan kewajiban tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintah tetapi juga dalam pembangunan. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Kinerja ini adalah gabungan dari tiga faktor penting yaitu kemampuan dan minat kerja seseorang pekerja, penerimaan dan penjelasan, delegasi dan tugas dan peran serta tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi tingkat ketiga faktor tersebut, maka semakin besarlah kinerja karyawan.(dalam Gultom,2014) Selain itu, Kinerja juga memiliki arti lain yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi atau perusahaan, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya

mencapai tujuan organisasi, secara legal dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (dalam Jufrizen, 2018). Dapat dikatakan semakin baik kinerja karyawan di perusahaan tersebut maka semakin mudah perusahaan mencapai tujuannya, dan sebaliknya apabila kinerja infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan guna untuk menunjang kebutuhan masyarakat salah satunya pembangunan jalan.

Infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan guna untuk menunjang kebutuhan masyarakat salah satunya pembangunan jalan. Pembangunan infrastruktur wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana, untuk memberdayakan masyarakat serta upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif. Pentingnya peranan pemerintah dalam pembangunan karena adanya keterbatasan masyarakat dalam berbagai bidang. Sedangkan pemerintah harus berfungsi sebagai penegak partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maupun dalam pengembangan berbagai tujuan pembangunan dan pemerintahan.

Terjadinya ketidakmerataan suatu pembangunan desa itu bisa berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas warga masyarakat tersebut, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan desa. Sehingga bukan hanya tugas pemerintah

desa dalam pembangunan infrastruktur fisik, tetapi seperti apa solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyeleksi proyek-proyek pembangunan disuatu desa.

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Pembangunan Infrastruktur Desa menjadi pusat perhatian pemerintah karena desa merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Desa dapat diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama, yang mempunyai kesatuan hukum, organisasi, dan batas geografis tertentu. Dalam geografi desa dapat menggambarkan suatu perkampungan yang dihiasi dengan hamparan sawah dan ladang dengan kehidupan masyarakat umumnya masih bersifat tradisional. Sesuai ketentuan umum pasal 1 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembangunan desa, infrastruktur merupakan salah satu kendala. Dengan infrastruktur desa yang terbatas seperti kurangnya akses jalan menuju persawahan ataupun ke kebun, jembatan antar desa yang tidak memadai, penerangan jalan yang tidak maksimal, irigasi yang kurang baik sehingga masyarakat desa tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya.

Keberhasilan suatu wilayah itu dilihat dari bagaimana pembangunan di desa, apakah sudah mensejahterakan masyarakatnya atau tidak. Pembangunan infrastruktur di desa tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan kota, desa dan kota memiliki potensi yang berbedasehingga dengan memadukan keduanya sehingga diperoleh keuntungan satu sama lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan infrastruktur, tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dalam arti bahwa pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan.

Desa Bangun Rejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara yang berjarak 10 km dari jalan Lintas Sumatera Utara. Desa Bangun Rejo memiliki Luas wilayah 13.462.23 dikatakan pembangunannya masih dikatakan sangat tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lainnya, terutama dalam persoalan infrastruktur jalan. Dari 15 km jalan utama desa hanya 5 km yang memiliki jalan bagus selebihnya memiliki kondisi jalan yang parah dan sedang. Pembangunan kondisi fisik di desa ini cukup lambat dilakukan karena desa terletak agak jauh dari pertumbuhan kota, keterbatasan anggaran pemerintah desa untuk melakukan proses pembangunan fasilitas tertentu

membuat desa tidak dapat berbuat banyak melakukan pembangunan infrastruktur desa karena jumlah anggaran dana desa yang paling menentukan pembangunan infrastruktur desa yang akan dibangun terlebih lagi di Desa Bangun Rejo juga pernah terjadi Tanah longsor. Akibatnya akses penghubung utama dalam mendongkrak perekonomian masyarakat menjadi susah dilalui.

Parahnya kondisi jalan utama dan beberapa jalan penghubung seperti gang yang ada di desa membuat akses jalan ke luar desa cukup sulit, akibatnya roda perputaran ekonomi masyarakat yang sebagian besar perkebunan dan petani memiliki akses yang cukup sulit dalam memasukan hasil pertanian dan perkebunannya, yang akibatnya daya beli rendah dan daya jual cukup tinggi, hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup lambat.

Pengelolaan pembangunan infrastruktur desa sangat berarti karena dampak pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan masyarakat sangat bermanfaat untuk kelancaran kegiatan perekonomian maupun kehidupan masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur di desa dapat dilakukan dengan adanya dukungan partisipasi masyarakat baik secara moril maupun materilsesuai dengan kondisi fisik desa. Berikut adalah gambar infrastruktur di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Parahnya kondisi jalan utama desa dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar 1.1 Jalan Desa Bangun Rejo



Sumber : peneliti, 2022

Parahnya kondisi jalan Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak terlepas dari tanggungjawab Kepala Desa, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan cukup rendah dan lamban.

Padahal Tanggung jawab Pemerintah Desa yang seharusnya melakukan Pembangunan Jalan justru belum terlihat masih banyak yang rusak dari jalan tersebut sehingga akses Masyarakat untuk memasarkan hasil petaninya menjai lambat untuk mengurus keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut tidak ada ditempat pelayanan pada saat jam kantor. Dikarenakan ada saat dimana selain harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, staf yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut tidak ada di tempat pelayanan pada saat jam kantor. Ini di karenakan ada saat dimana selain harus memberikan pelayanan kepada

masyarakat, staf di desa juga harus bisa membagi waktu untuk melakukan kepentingan pribadi salah satunya seperti mengurus lahan pertanian. karena mayoritas dari mata pencarian masyarakat di Desa Bangun Rejo ini adalah dengan bertani. Kondisi tersebut bahwa kinerja pemerintah Desa Bangun Rejo secara tidak langsung dikategorikan tidak baik, karena seharusnya kondisi jalan sebagai akses utama dalam kehidupan masyarakat harus memiliki kondisi yang baik.

Rendahnya kinerja pemerintah desa juga ditandai dengan pengakuan salah seorang warga yang mengatakan bahwa kondisi parahnya akses jalan penghubung desa sudah terjadi dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, meskipun adanya pembangunan infrastruktur jalan hanya terbatas dan sedikit saja dan itupun baru mulai pembangunan pada tiga bulan terakhir. Pada saat kondisi perencanaan pembangunan seharusnya pemerintah desa melaksanakan Musyrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang melibatkan perwakilan masyarakat umum, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda lainnya, namun hal ini tidak dilaksanakan oleh aparat pemerintahan desa. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintahan desa dalam proses pembangunan infrastruktur cukup lemah.

Lebih parahnya dari hasil pengamatan perangkat desa saat di jam kerja tidak ada di kantor. Secara umum perangkat desa mementingkan urusan pribadi. Dengan mengurus lahan pertanian karena mayoritas mata pencaharian yang ada di Desa Bangun Rejo adalah petani. Melihat dari permasalahan dan gejala yang ada, peneliti tertarik meneliti lebih dalam dengan mengambil judul skripsi **“Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :Bagaimana Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui bagaimana Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara praktis
  - a. Penelitian ini dapat menyelesaikan masalah Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bangun Rejo Kecamatan NaIX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara
  - b. Menjadi masukan untuk masyarakat desa untuk dapat melakukan sosial kontrol terhadap pemerintahan desa.
  - c. Sebagai perbandingan bagi peneliti lain yang ingin membahas masalah yang sama.
2. Sebagai Teoritis
  - a. Sebagai bahan bacaan bagi Fakultas khususnya jurusan pemerintahan desa Universitas Medan Area
  - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin membahas permasalahan yang sama
  - c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan desa terhadap literatur dalam permasalahan yang dibahas.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Kinerja

##### a. Pengertian Kinerja

Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi.

Kinerja adalah tingkat terdapatnya para pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan efektif (Simamora, 2018:34). Kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi. Kemudian Robbins (2018) mendefinisikan kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.

Kinerja menurut Permadi (dalam Sumiati & Riska, 2021) adalah kontribusi bersama antara pekerjaan organisasi, organisasi harus menciptakan kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan pegawai harus mempunyai disiplin kerja yang sesuai dengan job performance yang telah ditetapkan perusahaan. Selanjutnya, Suwondo dan Sutanto (Sumiati & Riska, 2021) mengemukakan bahwa kinerja pegawai adalah hasil dari kerja pegawai itu sendiri yaitu sebuah proses manajemen atau organisasi yang hasil kerjanya secara keseluruhan dapat

dibuktikan secara konkrit dan dapat diukur.

Defenisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian kinerja dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai pegawai, dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan organisasi, dan hasil kerjanya tersebut disesuaikan dengan hasil kerja yang diharapkan organisasi, melalui kriteria-kriteria atau standar kinerja pegawai yang berlaku dalam organisasi.

### **2.1.1 Tujuan Kinerja**

Adapun tujuan kinerja pegawai menurut Rivai (2019:549):

- a. Untuk perbaikan hasil kinerja pegawai, baik secara kualitas ataupun kuantitas.
- b. Memberikan pengetahuan baru dimana akan membantu pegawai dalam memecahkan masalah yang kompleks, dengan serangkaian aktifitas yang terbatas dan teratur, melalui tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan organisasi.
- c. Memperbaiki hubungan antar personal pegawai dalam aktivitas kerja dalam organisasi.

Kinerja pegawai dipengaruhi oleh berbagai faktor (Gibson, et all, 2018:375), antara lain:

1. Faktor individu, yaitu kemampuan dan keterampilan (mental dan fisik), latar belakang (pengalaman, keluarga, dst), dan demografis (umur, asal

usul, dll).

2. Faktor organisasi, adalah sumber daya, kepemimpinan, imbalan (kompensasi), struktur organisasi, dan diskripsi pekerjaan (job description).
3. Faktor psikologis, ialah persepsi, sikap, kepribadian, pola belajar, dan motivasi.

Dalam suatu organisasi pegawai dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja yang produktif, untuk itu pegawai harus memiliki ciri individu yang 28 produktif. Ciri ini menurut Sedarmayanti (2021:51) harus ditumbuhkan dalam diri pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari individu yang produktif antara lain:

1. Kepercayaan diri
2. Rasa tanggung jawab
3. Rasa cinta terhadap pekerjaan
4. Pandangan ke depan
5. Mampu menyelesaikan persoalan
6. Penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berubah
7. Memberi kontribusi yang positif terhadap lingkungan
8. Kekuatan untuk menunjukkan potensi diri.

Pendapat tersebut mengatakan bahwa untuk mendapatkan kinerja pegawai yang optimal yang menjadi tujuan organisasi harus memperhatikan aspek-aspek kualitas pekerjaan, ketetapan waktu, inisiatif, kemampuan serta komunikasi.

### 2.1.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja menurut para ahli yaitu sebuah ukuran kinerja karyawan sebuah organisasi atau perusahaan tertentu dalam mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Agus Dwiyanto (2008) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut:

a. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output.

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

c. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibility bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

d. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public memiliki akuntabilitas tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. (Mailantang dkk.,2018)

Adapun Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Lenfile (dalam(Junianto etal., 2020) mengemukakan beberapa indikator kinerja yang efektif, sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu kerja. Pegawai harus datang dan pulang kerja sesuai denganaturan dan tetap bekerja di tempat kerja selama jam kerja secara teratur danbenar.
2. Kepatuhan terhadapaturan kerja.Peraturan dan sistem kerja yang dibuat

menjadi pedoman kerja yang harus dipatuhi secara baik dan benar.

3. Kuantitas dan kualitas kerja yang memuaskan. Pekerjaan yang dilakukan harus memenuhi kuantitas dan kualitas yang tinggi, sehingga memuaskan bagi organisasi bersangkutan.
4. Penyelesaian pekerjaan dan semangat kerja yang baik. Kinerja tidak hanya menyangkut ketaatan seorang pegawai kepada organisasi, tetapi juga menyangkut semangat dan kegairahan kerja. Setiap pegawai idealnya harus dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, bukan keterpaksaan atau takut dikenakan sanksi.
5. Hubungan dan komunikasi yang efektif. Kinerja yang baik tidak akan muncul tanpa ada hubungan dan komunikasi yang efektif antara pimpinan dan staf.
6. Mampu memberi kontribusi dan nilai tambah. Kinerja yang baik akan menjadi motivasi dalam bekerja dan dihargai sebagai suatu nilai tambah bagi seorang pegawai.
7. Tanggung jawab terhadap asset organisasi. Asset organisasi sebagai sarana dan prasarana pendukung kerja haruslah dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pegawai yang memiliki kinerja yang baik akan selalu bertanggung jawab dengan baik pada setiap penggunaan atau memanfaatkan asset organisasi. Selanjutnya yang dikemukakan oleh Edi Sutrisno, (2014) yaitu kinerja pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian hasil dan standar kerja yang ditetapkan.

Adapun indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

a) Hasil Kerja

Tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan sejauhmana

pengawasan dilakukan.

b) Pengetahuan Pekerjaan

Tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dari hasil kerja.

c) Inisiatif Tingkat inisiatif selama melakukan tugas pekerjaan khususnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang timbul.

d) Kecekatan mental Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima intruksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerjaserta kerja yang ada.

e) Sikap Tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

f) Disiplin waktu dan absensi Tingkat ketetapan waktu dan tingkat kehadiran atau absensi.

Menurut Agus Dharma (2003) ( dalam Meiningsih, 2016) mengatakan hampir semua cara pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Kualitas Kualitas yaitu mutu yang harus dihasilkan (tepat atau tindakannya). Pengukuran kualitas keluaran mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.
2. Ketetapan waktu Ketetapan waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang ditentukan. Pengukuran ketetapan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kualitatif.

### 2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Dalam praktiknya tidak selamanya bahwa kinerja karyawan dalam kondisi seperti yang diinginkan baik oleh karyawan itu sendiri ataupun organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja baik hasil ataupun perilaku kerja adalah

sebagai berikut: (Kasmir,2016)

a. Kemampuan dan Keahlian

Merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan dan keahlian maka akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara benar, sesuai dengan yang telah ditetapkan.

b. Pengetahuan

Maksudnya adalah pengetahuan tentang pekerjaan. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan memberikan hasil kerja yang baik, demikian pula sebaliknya

c. Rancangan Kerja

Merupakan rancangan pekerjaan yang akan memudahkan karyawan dalam mencapai tujuannya

d. Kepribadian yaitu kepribadian seseorang atau karakter yang dimiliki seseorang

e. Motivasi Kerja

Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan. Jika karyawan memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau dorongan dari luar dirinya (misalnya dari pihak perusahaan), maka karyawan akan terangsang atau terdorong melakukan sesuatu dengan baik

f. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan perilaku seseorang pemimpin dalam mengatur, mengelola dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan sesuatu tugas dan tanggungjawab yang diberikannya



g. Gaya Kepemimpinan

Merupakan gaya atau sikap seorang pemimpin dalam menghadapi atau memerintahkan bawahannya.

h. Budaya Organisasi

Merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma yang berlaku dan dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan

i. Kepuasan Kerja

Merupakan perasaan senang atau gembira, atau perasaan suka seseorang sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan.

j. Lingkungan Kerja

Merupakan suasana atau kondisi di sekitar lokasi tempat bekerja. Lingkungan kerja dapat berupa ruangan, layout, sarana dan prasarana.

k. Loyalitas

Merupakan kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja dan membela perusahaan dimana tempatnya bekerja.

l. Komitmen

Merupakan kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau peraturan perusahaan dalam bekerja.

Disiplin Kerja Merupakan usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas kerjanya secara sungguh-sungguh. Disiplin kerja dalam hal ini dapat berupa waktu, misalnya masuk kerja selalu tepat waktu.

## 2.2 Pengertian Kinerja Organisasi

Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Kinerja Organisasi merupakan pencapaian hasil outcome pada level unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi dan manajemen organisasi.

Organisasi merupakan sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya baik kurang, metode, material, lingkungan, data, sarana dan prasarana dan sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja organisasi menurut Nawawi (2017:211) dewasa ini telah menjadi sorotan publik, hal ini karena telah timbulnya iklim demokratis dan keterbukaan. Disamping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan ini karena belum pernah disusun sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat suatu keberhasilan suatu organisasi. Dari uraian tersebut bahwa kinerja organisasi adalah fungsi hasil-hasil pekerjaan/kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dipengaruhi faktor intern dan ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu.

Kinerja organisasi menurut Sembiring (2012: 31) adalah keseluruhan hasil kerja organisasi yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan sumber-sumber daya dalam waktu tertentu. Kinerja

organisasi menurut Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2014: 7) merupakan pencapaian hasil (outcome) pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.

### 2.2.1 Tujuan Kinerja Organisasi

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengembangkan tugas dan pekerjaannya yang berasal dari organisasi. Kinerja juga merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh individu melalui proses dari organisasi atau perusahaan yang dapat diukur secara konkrit dan dibandingkan melalui standar yang telah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor individu, variabel psikologi dan variabel organisasi. Variabel individu meliputi kemampuan dan keterampilan baik fisik maupun mental, latar belakang seperti keluarga, tingkat sosial dan pengalaman; demografi menyangkut umur, asal usul dan jenis kelamin. Sedangkan variabel psikologis meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi.

Menurut Mangkunegara (2002:68) terdapat beberapa karakteristik kinerja pegawai, yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.
- b. Dapat mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.
- c. Memiliki tujuan yang realitas.
- d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuannya
- e. Memanfaatkan umpan balik (*feed back*) yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya.

Dari deskripsi di atas tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pekerjaan itu dan dapat menghasilkan kepuasan kerja yang nantinya akan berpengaruh pada tingkat imbalannya.

Menurut Rivai(2010: 311) tujuan kinerja organisasi pada dasarnya meliputi:

- a. Untuk mengetahui tingkat prestasi pegawai.
- b. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji pokok dan nintensif uang.
- c. Mendorong pertanggungjawaban dari karyawan.
- d. Meningkatkan motivasi kerja.
- e. Meningkatkan etos kerja.
- f. Sebagai pembedaa ntar akaryawan yang satu dengan yang lainnya.
- g. Memperkuat hubungan karyawan melalui diskusi tentang kemajuan kerja mereka.
- h. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan sumberdaya manusia dan karir.
- i. Membantu penempatan karyawan sesuai dengan pencapaian hasil kerjanya.
- j. Sebagai alat untuk tingkatan kinerja.

### 2.2.2 Manfaat Penelitian

Manfaat kinerja Organisasi adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuantim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-niliintik, memperbaiki proses

pelatihan dan pengembangan, peningkatan dasar ketrampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, mengusahakan basis perencanaan karier, membantu menahan pekerja terampil agar tidak pindah, mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan, serta mendukung program perubahan budaya.

### 2.3 Pemerintah Desa

Kehadiran pemerintah dan Keberadaan Pemerintah adalah suatu yang menjadi keharusan bagi proses dan Kewajiban dalam kehidupan masyarakat, sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah. (Sarundajang, 2002:5).

Pemerintah adalah bagian alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti seni. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, Legislatif dan Yuridis atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggaraan administrasi Negara (Manan, 2001:101).

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subag Hukum BPK, (2015:12)

Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasan pada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah Desa juga dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pengertian mengenai Desa kemudian dipertegas dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset, oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun, diregulasi dan penataan Desa pasca beberapa kali aman demen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangan menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan Desa di Indonesia.

Menurut Subag Hukum BPK (2015:15), perbedaan definisi Desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 tahun 2014 yakni bahwa dalam UU 37 Nomor 6 tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dapat berdasarkan prakarsa masyarakat. Namun secara esensi, definisi mengenai

desa ini tidak berbeda, kesemua definisi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah masih konsisten memberikan keleluasaan pada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangganya sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan Desa diantaranya;

1. Meningkatkan pelayanan publik bagi wargamasyarakat desa agar mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
2. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
3. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Desa perlu melakukan berbagai strategi, strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di Desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan dan pembangunan Desa. Dimana pembangunan Desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Robert Dalam Surandajang (2002:3) dalam mendorong pembangunan ditingkat Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat Desa yakni Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan Desa sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan asli Desa (PADes).

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi Desa yakni kewenangan Desa. Kewenangan Desa merupakan hak yang dimiliki Desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah

tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa meliputi

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan masyarakat desa
4. Pemberdayaan desa

Dilanjutkan pada pasal 18 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kewenangan Desa meliputi;

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Subbag Hukum BPK (2015:3) mengenai kewenangan pemerintah desa dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang



peraturanpelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun2014 tentang desa.

4. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BadanUsaha Milik Desa.

Menurut Subbag Hukum BPK (2015:80) sebagai daerah yang otonom, desa berhak mendapatkan sumber pendapatan. Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerahkabupate/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota, alokasi anggaran dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, Sumber pendapatan desa tersebut merupakan kekayaan Desa.Tentunya pengelolaan kekayaan milik desa harus dilaksanakan berlandaskan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Hal ini ditunjukkan agar pengelolaan kekayaan desa menjadi sarana mewujudkan pembangunan desa.

## **2.4 Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas. Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem.

Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Enam kategori besar infrastruktur (Grigg):

- 1) Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan);
- 2) Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalanrel, pelabuhan, bandar udara)
- 3) Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air);
- 4) Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);
- 5) Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;
- 6) Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas).

Berdasarkan American Public Works Association (Stone, 1974), infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan yang sama untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

## 2.5 Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai "a groups of houses or shops in a country area,

smaller than atown”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

R.Bintarto(2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antara unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah daerah. N.Daldjoeni (2011:4) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

H.A.W.Widjaja (2009:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa: Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut:

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12, Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

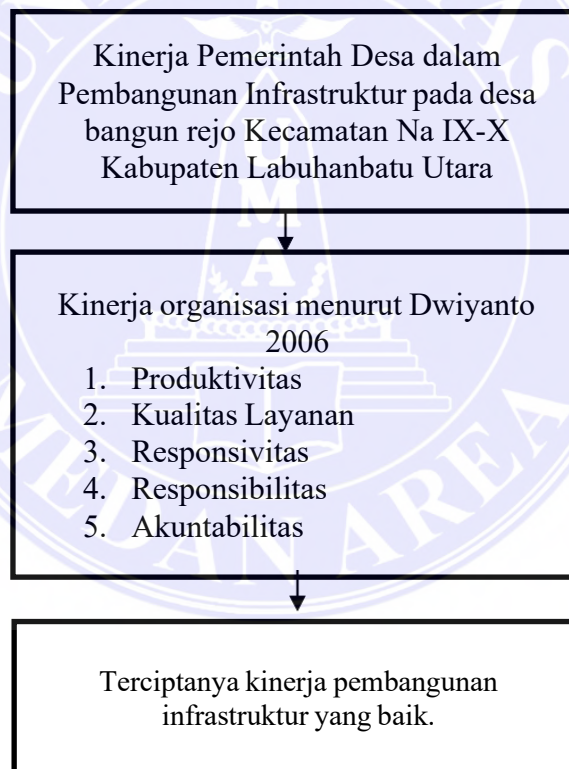
No	Nama peneliti, Judul dan tahun Penelitian	Metodologi penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, Maya Rosalina(2013)".	Jenis penelitian ini menggunakan Deskriptif kualitatif, Observasi Wawancara Dengan teknik Pengumpulan Data	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, tanggungjawab dan akuntabilitas pemerintah Desa untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif perlu adanya partisipasi masyarakat yang proaktif untuk mendukung pembangunan di desa.	-lokasi -tahun -teori
2	Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa melalui tata Kelola baik alokasi dana Desa (ADD), Khabib Nur Alfian, Purwo Adi Wibowo.(2017)".	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Observasi Wawancara Dengan Teknik Pengumpulan Data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan ADD di Desa Damarwulan disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat Keling. Setelah diterima oleh camat Keling kemudian dievaluasi dan diserahkan	-lokasi -tahun -teori

			kembali	
3	Desa dalam meningkatkan kinerja aparat Desa Mopunya Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, Muh Firyal A kbar , (2015).	Menggunakan metode kualitatif. Observasi Wawancara Dengan Teknik Pengumpulan Data.	Menunjukkan bahwa Adalah peran kepala desa dalam Meningkatkan kinerja aparat desa Mopuya selain menjalankan peran yang baik dengan melalui 4 peran yang sudah dilaksanakan oleh kepala desa. Sedangkan faktor yang menghambat peningkatan kinerja aparat desa Mopuyayaitu dari segi kehadiran yang tidak tepat waktu, kurangnya pengetahuan tentang komputer, kurangnya komunikasi dan kurangnya kesadaran diri dari aparat yang tidak aktif.	-lokasi -tahun -teori
4	Faktor-faktor penghambat pelaksanaan gerakan pembangunan desa melalui program infrastruktur, Andi Yusuf. 2016	Menggunakan metode yang sama dan teknik pengumpulan data yang sama	Hasil menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa belum maksimal dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tidak melibatkan masyarakat miskin dalam menentukan skala prioritas usulan yang akan dikerjakan; sumber daya manusia dan keahlian yang dimiliki oleh tim pelaksanaan kegiatan belum memenuhi syarat menjadi pelaksana.	-lokasi -tahun -teori
5	Pengaruh pembangunan infrastrukturjalan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Nazar Fajri, 2017	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Observasi, wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur jalan desa yang telah dibangun tahap demi tahap memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada khususnya desa jengala.	-lokasi -tahun -teori

## 2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian dideskripsikan secara umum adalah sebagai alur pemikiran yang logis yang menghubungkan antara teori dan konsep dengan berbagai variabel penelitian yang ditandai sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir penelitian bermanfaat untuk membuat hipotesis atau kesimpulan sementara penelitian. Secara garis besar, kerangka berpikir penelitian ini ada Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada desa bangun rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



Sumber ; diolah oleh peneliti, 2023

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk desain penelitian studi kasus terpancang atau *embed deducases study*. Digunakannya pendekatan kualitatif ini, mengikuti pemikiran Meleong (1998:5), bahwa “Pendekatan ini lebih mudah menyesuaikan diri apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, serta dianggap lebih peka terhadap penajaman pengaruh dari pola-pola nilai yang dihadapi”. Selain itu oleh Bogdan dan Taylor (Meleong, 1998:3), metode kualitatif diidentifikasi sebagai “Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini merupakan suatu riset kualitatif dengan pengumpulan data yang terarah berdasarkan tujuan dan pertanyaan riset yang lebih dahulu ditentukan. Riset ini tidak mengkaji keseluruhan aspek, akan tetapi memusatkan diri pada aspek yang dipilih berdasarkan kepentingan dan tujuan menurut penelitiannya (Sutopo, 1988:15).

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian Kinerja Perangkat Desa Dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Bangun Rejo Kecamatan NaIX-X Labuhan batu Utara. Alasan pemilihan lokasi ini antara lain didasarkan pada belum adanya standar penilaian kinerja Aparat Pemerintah Desa, belum transparannya proses pelayanan serta adanya keluhan masyarakat tentang kinerja



pelayanan aparat selama ini sebagai akibat dari belum berorientasinya bentuk pelayanan yang mengarah pada kepuasan masyarakat. Dari dasar data di atas, nampak bahwa situasi Desa Bangun Rejom emiliki tingkat kompleksitas yang paling tinggi yaitu luas wilayah yang cukup besardiikuti jumlah penduduk yang banyak. Atas dasar itu, Desa Bangun Rejo memberikan ketertarikan yang lebih untuk menelusuri tentang akuntabilitas kinerjanya dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilaksanakan peneliti ialah berkisar 3 bulan.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan - Feb	Mar - Mei	Juli	Agust
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023
1	Penyusunan Proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Perbaikan Proposal							
4	Pengambilan Data Penelitian							
5	Penyusunan Skripsi							
6	Seminar Hasil							
7	Perbaikan Skripsi							
8	Sidang Meja Hijau							

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan informasi data, tentang diri mereka dan tentang orang lain, atau bagaimana menghadapi peristiwa atau hal terkait dengan penelitian. Informan penelitian dipilih melalui sampling yang ditatgetkan berdasarkan pertimbangan kemampuannya untuk memberikan informasi yang lengkap dan relevan tentang tujuan penelitian.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini masyarakat atau petugas yang berwenang yang dapat menangani permasalahan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Informan kunci informan kunci adalah informan yang diyakini dapat membuka pintu bagi peneliti untuk memasuki subjek penelitian. Peneliti kemudian mewawancarai informan terpilih dan mencatat hasil wawancara tersebut. Informan kunci sering dijadikan tempat untuk bertanya oleh si peneliti agar dapat melihat gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang ingin diketahui adapun infoman kunci, dalam penelitian ini adalah Bapak Muhammad Arifin Matondang (kepala Desa) desa Bangun Rejo Kinerja Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan BatuUtara
2. Informan utama, merupakan orang yang terlibat langsung dalam proses interaksisosial yang akan di teliti, adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Bapak Habullah Ritonga (Sekretaris Desa) dan Ismail Pasaribu (Bendahara Desa) di Desa Bangun Rejo Kecamtan NaIX- X Kabupaten Labuhan Batu Utara
3. Informan tambahan/responden, merupakan orang yang membagikan informasi meskipun tidak ikut terkait secara langsung dengan interaksi

sosial yang diteliti, orang yang memberikan informasi tambahan dalam penelitian ini yaitu Ibu Sri Dahliana, Ibu Hawa (Masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan batu Utara).

Tabel 3.2 Nama-Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1	Muhammad Arifin Matondang	Informan Kunci
2	Habullah Ritonga	Informan Utama
3	Heru Silaen	Informan Utama
4	Sri Dahliana	Informan Tambahan
5	Hawa	Informan Tambahan

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Observasi langsung.

Observasi langsung merupakan suatu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian guna memperoleh data dan informasi untuk melengkapi deskripsi fokus kajian. Kegiatan ini dilakukan karena melalui observasi langsung, peneliti memiliki cukup waktu untuk mencatat dan menemukan berbagai peristiwa dari perspektif yang berbeda serta dapat menghindarkan diri dari masalah

bias hasil penelitian.

## 2. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Menurut Miles dan Huberman (Sutopo,1988:24) menyatakan bahwa Indepth Interview adalah: Cara pengumpulan data yang dilakukan secara informal,yang dapat dilaksanakan dalam waktu dan konteks yang dianggap tepat, guna mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berhati hati sesuai dengan keperluan penelitian tentang kejelasan masalah yang dijelajahnya.bentuk wawancara digunakan sebagai suatu teknik yang dilaksanakan agardapat menggali dan menangkap kejujuran informasi yang akurat dan benarsehingga mampu memberikan masukan dalam proses penganalisaan pokok kajian penelitian.

## 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen,tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademiky yang sudah ada. Tetapi tidak semua dokumen memilih tingkat kredibilitas yang tinggi.Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto bisa saja dibuat untuk kepentingan tertentu. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh adanya suatud

okumen.

#### 4. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan pengecekan data yang telah didapatkan untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh dapat menjamin keabsahan dan validitas data dari topik penelitian yang dilakukan. Triangulasi ialah pendekatan yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data. Pada dasarnya peristiwa yang sedang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga ditemukan kebenaran yang akurat dan valid jika dilihat dari perspektif, dan sumber informasi yang berbeda.

Teknik triangulasi digunakan untuk mendapatkan satu hasil data dengan sumber yang berbeda akan tetapi data yang didapatkan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Manfaat yang didapatkan dari menggunakan teknik triangulasi ini dalam melakukan sebuah penelitian adalah untuk memperbaiki kesalahan yang sering terjadi pada instrument penelitian, triangulasi juga dapat meningkatkan kepercayaan dari hasil penelitian, sehingga dapat mengembangkan pertanyaan ulasan untuk menggali data lebih mendalam (Nugrahani, 2014).

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalampola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema, hipotesis kerjadan kesimpulan (Meleong, 2000, 103). Dalam penganalisaan datanya, digunakan modelinteraktif karena dianggap paling relevan dengan metode penelitian kualitatif terpancangyang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini mengacu pada kebanyakan peneliti kualitatif terdahulu, yang sering mengikuti

model tersebut.

Dalam model analisis interaktif ini sebagaimana dikemukakan oleh Milles dan Huberman (1992:19) terdapat tiga hal utamayaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Tiga hal utama danpengumpulan data tersebut merupakan sebuah proses siklus yang saling berinteraksi. Dalam hal ini peneliti harus siap bergerak diantara empat sumbu kumparan selamapengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2018, hlm. 285) bahwa teknik analisis dataadalah cara yang digunakan berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Sementara itu pengertian teknik analisis data menurut para ahli lainnya seperti Patton (dalam Kaelan,2012,hlm.130) adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatupola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dalam pengertian yang satu ini, tampaknya data diperlakukan sebagai suatukoleksi informasi yang tidak berupa angka. Analisis data dalam suatu penelitian ditentukan berdasarkan jenis penelitian terlebih dahulu.

Bogdan (dalam Sugiyono, 2018, hlm. 334) menyatakan bahwa analisisdata dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain sehingga lebih mudah dipahami,dan temuannya dapat diinformasikan kepada oranglain

Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2018, hlm. 335) adalah bersifa tinduktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya

dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Sementara itu pengertian teknik analisis data menurut para ahli lainnya seperti Patton (dalam Kaelan, 2012, hlm. 130) adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Dalam pengertian yang satu ini, tampaknya data diperlakukan sebagai suatu koleksi informasi yang tidak berupa angka. Analisis data dalam suatu penelitian ditentukan berdasarkan jenis penelitian terlebih dahulu. Bogdan (dalam Sugiyono, 2018, hlm. 334) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2018, hlm. 335) adalah bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak.

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak seajeg data kuantitatif. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan. Tahap ini adalah proses memilih dan

memindahkan data yang dihasilkan penulis menjadi bentuk narasi.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud disini dapat sederhana tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami.

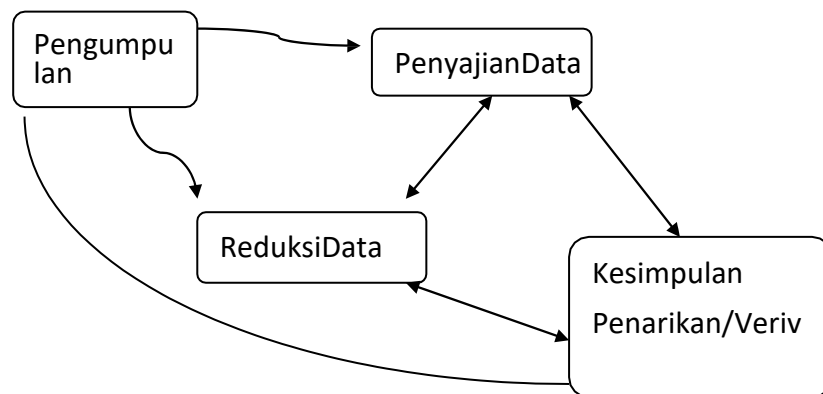
Kemudian sesudah terkumpul maka peneliti akan mengelompokkan setiap data yang terkumpul menjadi beberapa kategori berdasarkan landasan teori atau tinjauan pustaka yang dipaparkannya itu pada penelitian ini penulis memaparkan teori yang sudah dibaca menjadi beberapa sub bagian agar mudah untuk ditarik kesimpulan.

## 3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap ini penulis melakukan perbandingan antar sub bab dengan penelitian terdahulu sehingga dapat menarik kesimpulan dan menemukan apakah adanya perbedaan antar analisis penulis dengan penulis lain.



Gambar 3.1  
Model Analisis Data Penelitian Kualitatif



Sumber: Miles, M. B. dan Huberman, A.M. (1992:20)

### 3.6 Definisi Konsep dan Operasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.<sup>1</sup> Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian.

#### 3.6.1 Definisi Konsep

##### a) Kinerja Pemerintah Desa

Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian.

##### b) Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan

taraf hidup masyarakat secara luas. Ketika keadaan infrastruktur pada suatu negara lemah, maka itu berarti perekonomian di negara itu berarti berjalan secara tidak efisien bisa dikatakan seperti itu.

Besarnya biaya-biaya yang terbilang sangat tinggi bisa berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing dikarenakan biaya tersebut. Dengan munculnya ketidakadilan sosial misalnya juga bisa menjadi salah satunya. Pasti sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan ataupun susah anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu susah dan terbilang cukup mahal.

### 3.6.2 Definisi Operasional

Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja publik (Dwiyanto, dkk., 2006:49-51), yaitu sebagai berikut:

a. Produktivitas

Konsep tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output.

b. Kualitas Layanan

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik

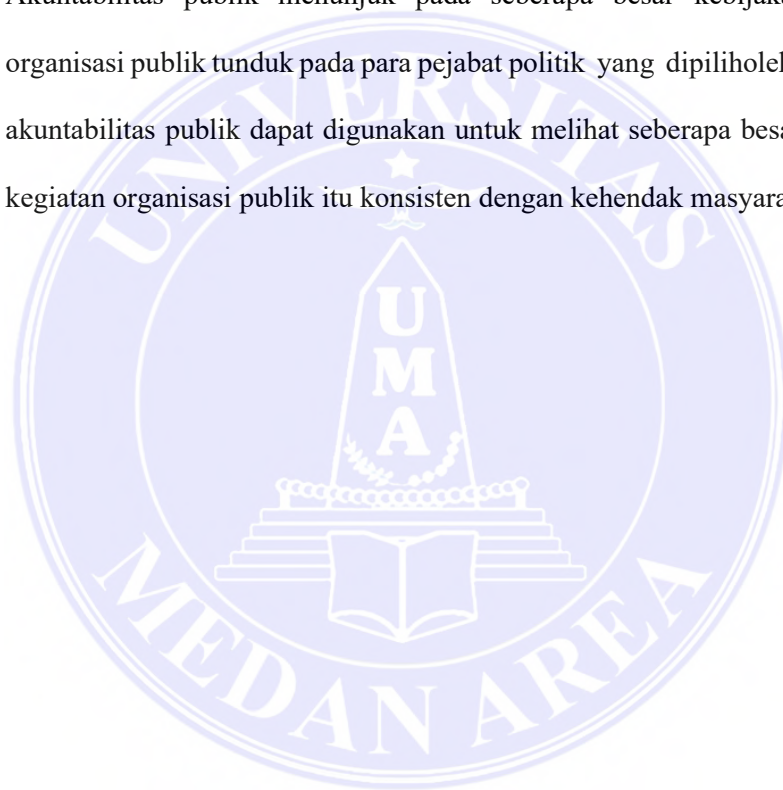
dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. **Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

e. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakandan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipiliholeh rakyat.Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besarkebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka dapat disimpulkan :

Bahwa kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur desa Bangun Rejo sudah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana kinerja pemerintah desa bersifat :

- 1) Produktivitas, Kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur, bahwa Pemerintah Desa sudah menyelesaikan pembanguann infrastruktur jalan namun masih sebagian kecil, dan dalam penyelesaiannya tidak efisien dari segi penggunaan hemat tenaga pelaksanaan dikarenakan beberapafaktor. Dan sudah dilakukan secara efektif pelaksanaan pelayanan, yaitu sudah sesuai seperti yang diharapkan masyarakat, dengan artian bahwa sudah optimal atau berjalan dengan baik.
- 2) Kualitas Layanan, kualitas layanan Pemerintah Des Bangun Rejo KecamatanNa IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara cukup baik sehingga membuat Kinerja Pemeritah Desa berjalan dengan maksimal.
- 3) Responsivitas, sudah melakukan pembangunan sesuai dengan aturan-aturanyang berlaku. Tidak hanya itu pemerintah desa juga sudah baik

menyikapi atas aspirasi masyarakatnya hanya saja tidak semuanya disampaikan masyarakat dapat terealisasi dikarenakan pemerintah desa lebih memilih pembangunan mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu.

- 4) **Responsibilitas**, Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah pusat maupun daerah hal ini mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam ALBESTEK perencanaan pembangunan. Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan sudah sesuai sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
- 5) **Akuntabilitas**, Kinerja pemerintah Desa dalam aspek Akuntabilitas sudah menyampaikan tepat pada waktunya. Dan dalam pembuatan pelaporan pertanggung jawaban memang adanya kendala, namun hal itu dapat diatasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa sudah berjalan dengan baik

## 5.2 Saran

Adapun saran dari penulis dari hasil penelitian tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur jalan Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan batu Utara yaitu sebaiknya pemerintah desa lebih memahami apa kebutuhan dari masyarakat sehingga roda pemerintahan dalam pembangunan desa bisa berjalan dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akbar Firyal Muh, (2015) *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Mopunya Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango*.
- AW. Widjaja, 2009. *Pemerintah Desa dan Administrasi Sesa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Bintarto. R., 2010. *Desa Kota Bandung*: Alumni.
- Daldjoeni. N, 2011. *Intraksi Desa Kota*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan public*.
- Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pekayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Farida, Nugrahani. 2014 *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo Cakrabooks
- Fazri Nazar, (2017). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa*
- Jakarta Kencana. Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*, Bandung Alfabeta
- Kasmir. "Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)". Cetakan ke-1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016
- Katili Yusuf Andi, (2016). *Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Desa (Gerakan Desa) Melalui Program Infrastruktur*
- Lexy. J. Moleong (1998), *Metodologi Penelitian, CV. Remaja Rosdakarya, Bandung*
- Meiningsih, M. R. (2016). *Peranan Camat dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Camat Parindu Kabupaten sanggu. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5 (September)*.
- Nawawi, U., & Ismail. (2017). *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*.
- Purwo & khabib (2017). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Tata Kelola Baik Alokasi Dana Desa*
- Rivai, Veitzal 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Rosalina Maya (2013). *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kualalapangan Desa Teras Kecamatan Maninjau Barat Kabupaten Malinau Barat*.

Sembiring, M.(2012). *Budaya & Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokusmedia.

Sudarmanto. (2014). *Kinerjadan Pengembangan Kompetensi SDM*

Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta.

Sutrisno Edy, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetak Ke 6. Pranada Media Grup, Jakarta.

## Jurnal

Gultom, D. K. (2014). Pengaruh Budaya Organisasi perusahaan Dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perusahaan gas negara (Persero) Tbk Medan. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 14(02),176–184.

Junianto, I., Isabella, I., & Kencana, N. (2020). *Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5 (1), 30–37.

Sumiati, & Riska, Y. (2021). *Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di kantor Bupati Kabupaten Solok*. 3 (Desember), 473–482.

## Undang–Undang

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *tentang perubahan kedudukan*

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *tentang pemerintahan daerah*

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *Tentang pemerintah daerah*

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2010 *tentang desa Badan Usaha Milik Desa*

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 *tentang peraturan pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri*

## LAMPIRAN

### Surat Keterangan Riset

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7366012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Deliabudi Nomor 70 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id - E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 102/FIS.2/01.10/1/2023  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset  
01 Februari 2023

Yth,  
**Kepala Desa Bangun Rejo Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara**  
**Di Tempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Intan Purnama Sari  
N P M : 198520013  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Kepala Desa Bangun Rejo Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan judul Skripsi "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bangun Rejo Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dehan  
  
Dr. Riffati Juliana Hasibuan, M.Si

CC: File--





## Surat Keterangan Selesai Riset

 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
KECAMATAN NA.IX – X  
KEPALA DESA BANGUN REJO  
Alamat :JlnSimonisNomor : 01 Telp (0624) Pos : 21454

---

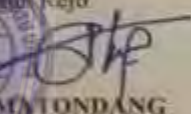
**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 470/ *399* /PEM/BR/2023


Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Bangun Rejo,  
Menerangkan bahwa Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas  
Medan Area:

Nama : **INTAN PURNAMA SARI**  
NPM : 198520013  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Study : Administrasi Publik

Benar – benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 5-20 Feb 2023 di Desa  
Bangun Rejo Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menyusun  
skripsi dengan judul **Kinerja Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur di  
Desa Bangun Rejo tahun 2023.**

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangun Rejo, 2023  
Kepala Desa Bangun Rejo  
  
**MHD. ARIFIN M. TONDANG**



## Dokumentasi Bersama Informan



Bapak Leonardo Pasaribu



Bapak Heru Silaen



Ibu Sri Dahliana Rambe

## Dokumentasi Infrastruktur



Dokumentasi Infrastruktur Jalan Rusak Di Desa Bangun Rejo



Dokumentasi Infrastruktur Jalan Rusak Di Desa Bangun Rejo



Dokumentasi Infrastruktur Jalan Yang Hampir Selesai Di Perbaiki Di Desa Bangun Rejo



Dokumentasi Infrastruktur Jalan Yang sudah Selesai Di Perbaiki Di Desa Bangun Rejo